

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan kekayaan alam yang melimpah, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang beragam pada setiap daerahnya. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk terbesar dan termasuk ke dalam kategori negara berkembang yang dapat dikatakan sedang menuju menjadi negara maju. Guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, Indonesia melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi setiap daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah menjadi suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan meminimalisir kesenjangan antar daerah yang ada.

Sampai saat ini, kesenjangan antar daerah di Indonesia masih terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi geografis, serta jumlah penduduk setiap daerah yang berbeda-beda. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS), menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga pertengahan 2023

mencapai 278 juta jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 150,32 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia yaitu sebanyak 49,02 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan jumlah penduduk, maka penerimaan pemerintah daerah akan berbeda. Semakin banyak penduduk produktif yang tinggal di suatu daerah, maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan daerah tersebut, salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada suatu daerah (Apriyani, 2018). PAD merupakan tolak ukur yang penting guna menentukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah mampu membawa pengaruh yang positif bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam, akan tetapi tidak dengan daerah yang kekurangan sumber daya alamnya, di mana hal tersebut menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya yaitu terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Nia Safitri, 2018).

Kemandirian suatu daerah dapat tercermin dari PAD karena PAD menjadi hal penting dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam suatu daerah tertentu serta dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan cakupan dari penerimaan PAD sendiri terdiri atas hasil pajak, retribusi daerah, hingga pendapatan yang berasal dari dinas-dinas, BUMN, dan PAD lain-lain yang sah,

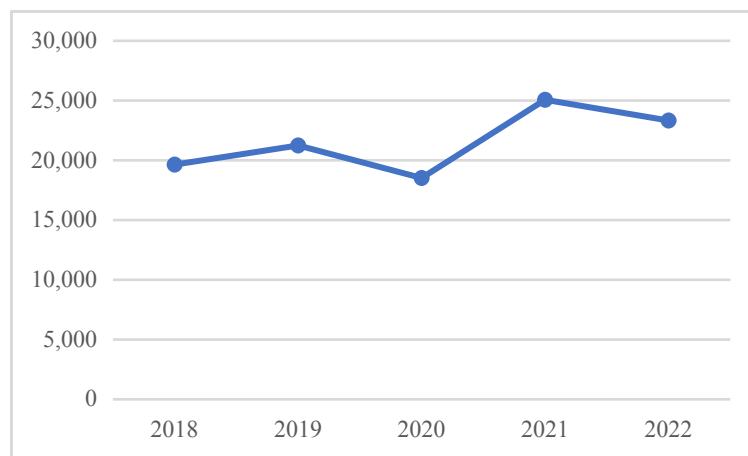
yang mana pendapatan-pendapatan asli daerah ini nantinya akan dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Tujuan dari PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah guna mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sehingga menjadi sebuah perwujudan dari desentralisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Prasetyo (2018) menyatakan bahwa PAD menjadi sumber pendanaan otonomi daerah, oleh karena itu pengoptimalan PAD akan menunjang pembangunan daerah yang pembiayaannya bersumber dari PAD. Pada akhirnya, daerah tersebut dapat berkembang dan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang. Semakin besar nilai PAD suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, apabila sarana dan prasarana di setiap daerah meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini masih banyak wilayah yang dihadapkan dengan ketergantungan fiskal berupa subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan PAD yang dimiliki daerah tersebut. Dalam menjalankan otonomi daerah, salah satu cara untuk melihat kemampuan daerah tersebut adalah diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah (Halim, 2004).

Menurut catatan BPS pada tahun 2021, PAD seluruh Pemprov di Indonesia berkontribusi sebesar 46,47% dari total realisasi pendapatan, di mana pendapatan transfer dari pemerintah pusat berkontribusi sebesar 52,84% dan lain-lain pendapatan berkontribusi sebesar 0,69%. Dengan demikian, membuktikan bahwa PAD mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan untuk

membiyai pembangunan setiap daerah. Adapun Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, termasuk ke dalam wilayah yang mendominasi pendapatan-pendapatan terbesar setelah ibu kota negara dengan pendapatan sebesar Rp. 36,99 triliun. Pemprov Jawa Barat dalam hal meningkatkan PAD haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaan PAD dan ditentukan dalam Peraturan Daerah karena pentingnya PAD bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, percepatan pembangunan menjadi prioritas setiap daerah seperti Provinsi Jawa Barat untuk menyambut Indonesia Maju 2024 (KPPIP, 2019). Pada tahun 2021, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat melakukan rapat koordinasi mengenai percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, PAD akan menjadi sumber pendanaan dalam pembangunan dan diharapkan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi penting dan pemerintah Jawa Barat perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PAD sebagai dasar kebijakan dalam pengoptimalan PAD. Selanjutnya, percepatan pembangunan tersebut dapat terwujud yang nantinya akan berdampak pada sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri serta akan terjadi peningkatan lapangan usaha (Prasetyo, 2018).

PAD Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami pertumbuhan selama periode 2018 sampai dengan 2022. Hal ini dapat dibuktikan melalui data realisasi penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat yang tertera pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

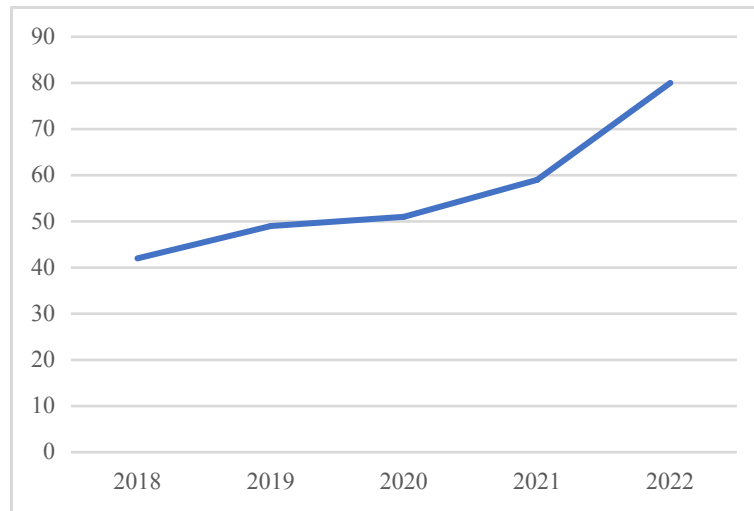
*Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai PAD tahun 2021 menjadi urutan pertama selama periode 2018-2022 yaitu sebesar Rp. 25.066.632.129.000 di mana terjadi perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Pada tahun 2018 terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp. 19.642.915.448.760 dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi Rp. 21.244.266.598.020. Selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi Rp. 18.521.882.174.000 dikarenakan pada tahun ini terdampak pandemi covid-19.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi PAD yaitu nilai investasi, dengan adanya investasi pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan modal yang nantinya digunakan untuk membiayai infrastruktur pembangunan yang ada

di daerahnya. Menurut Jeddawi (2005), untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu indikator dinamika kemajuan perekonomian, penanaman modal menjadi faktor strategis. Semakin besar alokasi penanaman modal, maka akan semakin besar pula kemungkinan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sependapat dengan teori dari Prathama Rahardja dan Mandala Manurung bahwa pengaruh investasi terhadap PAD sangat besar, apabila investasi (penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing) dapat masuk ke dalam suatu daerah, maka akan memberikan dampak semakin luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli yang meningkat sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan PAD maka daerah diharapkan mampu menarik perhatian para investor. Dengan adanya investasi akan membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan dapat menambah keuangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat membayar pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang paling banyak diminati oleh para investor untuk berinvestasi. Menurut kepala Bank Indonesia (BI), infrastruktur menjadi daya tarik investor guna menanamkan modal di Jawa Barat, antara lain seperti kawasan industri, jalan tol, jalur kereta api, bandara, serta pelabuhan yang terus dikembangkan. Selain itu, dukungan kebijakan dan berbagai insentif yang memberikan kemudahan bagi para investor. Berikut realisasi PMDN Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 1.3.



**Gambar 1.3. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa nilai PMDN Jawa Barat mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022, di mana pada tahun 2022 merupakan tahun tertinggi pencapaian investasi yaitu sebesar Rp. 80 milyar. Pada tahun 2018 nilai investasi dalam negeri Jawa Barat mencapai Rp. 42 milyar, tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 49 milyar, tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 51 milyar, serta tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 59 milyar. Dalam hal ini, investasi dalam negeri Jawa Barat masih dalam kondisi aman karena masih terjadi peningkatan selama tahun 2018-2022, meskipun pada masa pandemi covid-19.

Selain itu, indikator yang dapat mempengaruhi PAD adalah jumlah industri di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi sendiri mengenai produksi



dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Dalam hal ini, pertumbuhan unit usaha dari suatu sektor yaitu industri di suatu daerah secara signifikan akan menambah jumlah lapangan pekerjaan serta pendapatan dari suatu daerah. Adapun data jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Industri</b>
<b>2018</b>	9470
<b>2019</b>	8724
<b>2020</b>	8215
<b>2021</b>	8334
<b>2022</b>	8576

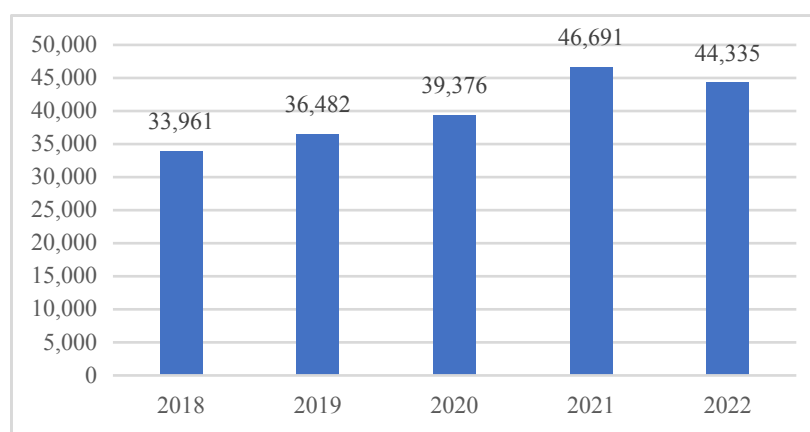
**Tabel 1.1. Jumlah Industri Besar Sedang Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2018-2022 (Unit)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2020 jumlah industri besar sedang di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah industri adalah sebanyak 9470 unit, tahun 2019 mengalami penurunan cukup jauh menjadi 8724 unit, dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan lagi menjadi 8215 unit. Setelah mengalami penurunan terus menerus selama 3 tahun, tahun 2021 jumlah industri mengalami sedikit peningkatan menjadi 8334 unit. Peningkatan terjadi lagi pada tahun 2022 dengan jumlah 8567 unit industri.

Selain jumlah industri, pengeluaran pemerintah juga secara tidak langsung memberikan dampak terhadap PAD. Pengeluaran Pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kegiatan ekonomi, Dengan meningkatnya kegiatan akan menambah aliran penerimaan pemerintah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (Julia,

2022). Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah akan mendorong perekonomian suatu daerah. Menurut (Azhar, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tingginya arus pengeluaran pemerintah, maka pendapatan di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Jumlah pengeluaran pemerintah sangat berarti untuk pengembangan industri dan PAD. Berikut adalah realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 1.4.



**Gambar 1.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Gambar 1.4 diketahui bahwasanya pada tahun 2018-2021 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2022. Tahun 2018, nilai pengeluaran pemerintah yaitu Rp. 33.961.201.705.870. Tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 sebesar Rp. 36.482.714.855.460 lalu tahun 2020 sebesar Rp. 39.376.316.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp. 46.691.617.000.000. Pada tahun 2022, mengalami penurunan nilai yaitu menjadi Rp. 44.335.231.000.000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dilihat bahwa fenomena pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti PMDN, Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022”**.

### **1.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PMDN, Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022?
2. Bagaimana pengaruh PMDN, Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PMDN, Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh PMDN, Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian terkait pengaruh PMDN, Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk pemerintah daerah agar senantiasa mendorong peningkatan PAD serta dapat meningkatkan PMDN khususnya bagi pertumbuhan industri-industri yang ada di Provinsi Jawa Barat agar mampu menyumbang terhadap pendapatan nasional. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menstabilkan pengeluarannya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, bahan informasi, serta sumber data bagi akademisi lainnya sebagai penunjang kegiatan perkuliahan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini yaitu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Open Data Jawa Barat.

##### **2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024, dimulai sejak bulan September 2023 dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi ekonomi pembangunan.

**Tabel 1.2.**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2023-2024								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Judul									
2	Pengumpulan Data									
3	Penyusunan UP dan bimbingan									
4	Seminar UP									
5	Penyusunan skripsi dan bimbingan									
6	Sidang skripsi									